

**KAJIAN PEMBIAYAAN SAMPAH  
DALAM Mendukung PENGELOLAAN SAMPAH  
DI PASAR JOHAR KOTA SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**

Oleh:

**Andrik F. C. A.**

**L2D 005 341**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

## ABSTRAK

Kota akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pertumbuhan dan perkembangan ini akan diiringi oleh pertambahan jumlah penduduk yang cepat dan bertambahnya aktivitas masyarakat. Adanya kecenderungan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta diikuti kegiatan kota yang makin berkembang maka akan menimbulkan dampak adanya buangan/ limbah yang meningkat dan bervariasi. Buangan tersebut bisa berupa sampah padat dan limbah cair yang merupakan hasil kegiatan pemukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Hasil buangan limbah tersebut memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam pengelolaan sampah terdapat 5 aspek yang berpengaruh yaitu pembiayaan, kelembagaan, hukum, teknik operasional dan peran serta masyarakat. Dari kelima aspek tersebut, aspek pembiayaan merupakan aspek yang paling berpengaruh karena sebagian besar kegiatan dalam pengelolaan sampah memerlukan biaya atau dapat dikatakan aspek pembiayaan merupakan ujung tombak dalam pengelolaan sampah.

Pasar Johar merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Semarang, merupakan tempat atau pusat kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan sampah dalam jumlah yang besar. Pengelolaan sampah di Pasar Johar dilakukan oleh Dinas Kebersihan yang bekerja sama dengan pihak ketiga yakni Koperasi Karsa Bersama. Kondisi pengelolaan sampah di Pasar Johar dapat dikatakan buruk. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya timbunan-timbunan sampah yang tidak terangkut setiap harinya baik yang ada dalam pasar maupun di TPS pasar. Menurut pihak pengelola, permasalahan dalam mengelola sampah di Pasar Johar adalah masalah biaya dimana biaya yang dibutuhkan untuk mengelola sampah masih kurang dan mereka merasa rugi. Sumber dana untuk pembiayaan pengelolaan sampah dapat berasal dari retribusi masyarakat dan subsidi dari pemerintah. Para pedagang Pasar Johar sendiri beranggapan bahwa mereka sudah membayar retribusi untuk pelayanan kebersihan sesuai yang telah dibebankan kepada mereka. Sumber pendapatan yang kedua adalah subsidi dari pemerintah, akan tetapi dalam pengelolaan sampah di Pasar Johar, pihak pengelola tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah kota. Sehingga muncullah pertanyaan, bagaimana sistem pembiayaan sampah di Pasar Johar?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pembiayaan dalam pengelolaan sampah di Pasar Johar yaitu melihat kembali sistem pembiayaan pengelolaan persampahan yang didalamnya mencakup struktur penerimaan dan pengeluaran serta Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Struktur pengeluaran dalam penelitian ini memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga perlu suatu batasan melalui batasan materi yaitu hanya terbatas pada pengeluaran untuk biaya operasional pengelolaan sampah. Adapun pembatasan materi ini karena pengeluaran ini rutin dilakukan setiap tahun dan berkaitan langsung dengan aspek teknis operasional. Pendekatan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan campuran. Pendekatan campuran ini menggunakan 2 metode yaitu metode kualitatif komparatif dan deskriptif serta metode kuantitatif deskriptif. Teknik memperoleh data yaitu melalui wawancara kepada narasumber yang terdiri atas instansi pemerintah dan pengelola kebersihan, kuesioner kepada pedagang serta observasi lapangan.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh pihak pengelola kebersihan jauh dari yang seharusnya. Hal ini dilihat dari hasil perhitungan antara jumlah pedagang dikalikan dengan tarif retribusi yang seharusnya dibayar. Jumlah pendapatan saat ini belum bisa menciptakan pengelolaan sesuai dengan standar minimal pengelolaan sampah. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan guna mencukupi jumlah pengeluaran yang sesuai dengan standar. Terdapat 7 skenario pembiayaan untuk menciptakan pengelolaan sampah di Pasar Johar yang baik. Ketujuh skenario ini berdasarkan kondisi eksisting dan kondisi yang akan datang dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait. Sistem pembiayaan sampah yang sesuai dengan kondisi yang ada ini bertujuan agar dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di Pasar Johar. Hasil penelitian ini akan direkomendasikan kepada dua pihak, yakni Dinas Kebersihan dan Dinas Pasar Kota Semarang yang memiliki fungsi sebagai regulasi kebijakan pengelolaan sampah serta Koperasi Karsa Bersama sebagai pihak yang menangani langsung pengelolaan sampah pasar di Pasar Johar agar lebih dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat di Pasar Johar.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Sampah Pasar, Pembiayaan Sampah, ATP dan WTP

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini akan menjelaskan mengenai latar belakang studi yang diambil, perumusan masalah yang didapat dari penjabaran semua permasalahan yang terjadi di wilayah studi, tujuan dan sasaran dilakukannya studi, ruang lingkup studi, manfaat dan keaslian penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan sampel serta teknik analisis dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

### **1.1 Latar Belakang**

Kota akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pertumbuhan dan perkembangan ini akan diiringi oleh pertambahan jumlah penduduk yang cepat. Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama terjadinya permasalahan sampah karena manusia merupakan penghasil utama sampah. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak imbangi dengan pengelolaan sampah yang baik akan menyebabkan bertambahnya tumpukan sampah di berbagai tempat. Adanya kecenderungan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta diikuti kegiatan kota yang makin berkembang akan menimbulkan dampak adanya buangan/ limbah yang meningkat dan bervariasi. Buangan tersebut bisa berupa sampah padat dan limbah cair yang merupakan hasil kegiatan pemukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya (*Suprihatin, 1996*).

Salah satu sumber sampah perkotaan berasal dari kegiatan perdagangan di pasar. Karakteristik sampah pasar dominan berupa sampah organik, basah dan mudah membusuk, serta memiliki volume besar karena utamanya merupakan sampah yang berasal dari sayur dan buah. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik tersebut agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan pasar maupun sekitarnya. Pasar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, berdasarkan komoditas barang yang diperjualbelikan. Jenis barang yang diperjualbelikan dan jumlah pedagang yang beroperasi dalam suatu pasar merupakan dasar untuk memperkirakan besarnya timbulan sampah. Banyaknya timbulan sampah menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan sampah di tempat tersebut kurang baik (*Admin, 2007*).

Komponen pokok sistem pengelolaan persampahan perkotaan terdiri atas 5 (lima) subsistem pengelolaan yaitu subsistem kelembagaan, subsistem teknis operasional, subsistem pembiayaan, subsistem legalitas (hukum) dan subsistem peran serta masyarakat. Aspek teknis

operasional meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pemindahan dan pembuangan akhir serta pengolahan sampah (*SK SNI T- 13-1990-F*). Kelima komponen tersebut harus saling mendukung dan adanya keterhubungan guna terciptanya suatu pengelolaan sampah yang baik. Di samping itu, diperlukan juga suatu koordinasi antar stakeholder guna mendukung sistem pengelolaan persampahan.

Aspek pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Aspek pembiayaan dapat dikatakan sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sampah karena akan sangat mempengaruhi aspek lainnya terutama aspek teknis operasional seperti dalam penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah seperti wadah sampah, sapu dan truk pengangkut sampah. Pada umumnya sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari retribusi yang dibebankan kepada masyarakat dan berasal dari pemerintah (melalui subsidi). Dana untuk pengelolaan persampahan/ kebersihan suatu kota besarnya 5-10% dari APBD. Selain itu, diusahakan agar biaya pengelolaan sampah dapat diperoleh dari masyarakat ( $\pm 80\%$ ), dan Pemerintah Daerah menyediakan  $\pm 20\%$  untuk pelayanan umum antara lain penyapuan jalan, pembersihan saluran dan tempat-tempat umum (*Dinas Kimpraswil, 2003*).

Pengelolaan persampahan di Kota Semarang secara umum di bawah tanggung jawab Dinas Kebersihan Kota Semarang. Selain Dinas Kebersihan Kota Semarang, dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan kota terdapat juga pelaku lain seperti masyarakat pada tingkat RT/ RW terutama saat proses pewadahan hingga pengumpulan ke TPS serta pihak swasta yang mendapat kontrak pelayanan dari pemerintah. Sedangkan pengelolaan sampah pasar di Kota Semarang diwenangkan kepada Dinas Pasar sebagai pengelola yang sah dari jajaran pemerintah kota. Biasanya pengelolaan sampah pasar di Kota Semarang dari pasar ke TPS dilakukan oleh Dinas Pasar dan sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan.

Akan tetapi saat ini, Dinas Pasar mengalami defisit anggaran sehingga mengharuskan pemerintah kota untuk mengambil suatu langkah yang sesuai dan tepat supaya pengelolaan sampah pasar tradisional menjadi lebih baik. Langkah yang diambil oleh pemerintah kota antara lain dengan pelibatan pihak swasta atau yang sering disebut dengan swastanisasi. *Public privat partnership* merupakan kerjasama antara pemerintah dan swasta, dimana kedua pihak tersebut mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Pengelolaan sampah di Pasar Johar melalui *public privat partnership*, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebersihan dan Dinas Pasar bekerjasama dengan pihak swasta. Berkaitan dengan pembiayaan dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari proses pewadahan, pengumpulan sampah sampai ke pembuangan akhir, masing-masing mempunyai bagian sendiri dalam melakukan pengelolaan. Sebagai contoh tanggung jawab dari pihak swasta dalam hal pembiayaan adalah membayar gaji pegawai yang mengumpulkan atau

mengangkut sampah sedangkan dari pihak pemerintah menyediakan sarana angkutan untuk pembuangan akhir ke TPA.

Pasar Johar merupakan pasar percontohan pertama di Kota Semarang yang pengelolaan persampahannya diserahkan kepada pihak swasta. Pada awalnya pengelolaan kebersihan di Pasar Johar dikelola oleh Pusat Koperasi Pasar (Puskoppas) Jawa Tengah melalui Unit Usaha Pengelola Kebersihan Pasar Johar dengan kontrak selama 6 tahun, terhitung mulai 1 Juni 2001 sampai dengan 31 Juni 2007, dimana terdapat koordinasi dengan Dinas Pasar dan Dinas Kebersihan dalam hal pengawasan, pembinaan dan penelitian mengenai kinerja pengelolaan sampah yang dikelola oleh unit tersebut. Setelah masa kontraknya habis, Pemerintah Kota Semarang menyerahkan urusan pengelolaan sampah di Pasar Johar kepada Koperasi Karsa Bersama melalui sistem lelang. Pergantian kewenangan pengelolaan sampah di Pasar Johar disebabkan karena ketidakmampuan pihak Puskoppas untuk memenuhi tuntutan kenaikan gaji dari pegawainya dan adanya desakan dari pedagang yang mengeluhkan buruknya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak Puskoppas.

Selama masa pengelolaan pihak Puskoppas dan Koperasi Karsa Bersama, para pengelola mengaku masih merugi akibat pendapatan yang lebih kecil daripada pengeluaran sehingga pengelolaan sampah di Pasar Johar belum optimal. Ketua Koperasi Karsa Bersama, Agus Tiyanto, mengatakan selama ini pemasukan retribusi sampah tidak maksimal, sehingga langkahnya juga tidak bisa maksimal. Pihaknya tidak menerima subsidi dari Pemkot, sehingga untuk pengelolaan sampah pihaknya murni mengandalkan dana dari hasil penarikan retribusi. Untuk gaji karyawan dan biaya operasional pengelolaan sampah, pihaknya mengaku kekurangan setiap bulannya. Hal ini yang menyebabkan pihaknya belum dapat meningkatkan pelayanannya menjadi lebih baik. Inilah indikator bahwa pengelolaan sampah di Pasar Johar kurang baik yang utamanya disebabkan karena permasalahan pada aspek pembiayaannya.

Menurut The Allen Consulting Group (2003), salah satu sumber pembiayaan dalam pengelolaan sampah dapat berasal dari retribusi yang biasa disebut dengan *user charger* (tarif pelanggan). Besarnya *user charger* dipengaruhi oleh *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP) atau disebut juga dengan kemampuan dan kemauan masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Semakin besar nilai ATP dan WTP maka semakin besar pula tarif pelanggan yang dapat dibayarkan, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut, akan mempengaruhi peningkatan jumlah pemasukan pendapatan dalam pengelolaan sampah yang nantinya dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran dan peningkatan pelayanan kebersihan.

Tarif retribusi dibayarkan para pedagang kepada pihak pengelola yang menangani pengelolaan sampah. Besarnya biaya retribusi ini beragam antara pedagang yang satu dengan yang lain. Besarnya tarif retribusi kebersihan yang dibayar pedagang per harinya, yaitu sebesar Rp 300 - Rp 500 per hari. Ketentuan ini berdasarkan volume sampah yang dihasilkan, semakin besar jumlah